

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agus salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku sumber untuk Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Tiara Wacana,2006), Hal 14.
- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Hal 220
- Arikunto, Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.Hal 136.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif pendekatan*, (Jakarta:Kencana,2008), Hal 56
- Bratakusumah, Deddy Supriady. *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Gramedia Pustaka Utama, 2001. Hlm 240.
- BAB IV RPJMD Kabupaten Wonogiri 2016-2021, hlm. IV,10
- Dewi, Indah Mustika. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)*. Diss. Universitas Diponegoro, 2011.
- Firmansyah, M. Anang, and Budi W. Mahardhika. *Pengantar Manajemen*. Deepublish, 2018.
- Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta, 2004, hlm.73.
- John Suprihanto, *Manajemen*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2014, hlm. 134.
- Kumorotomo, Wahyudi. "BAB II TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA." *FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM*: 7.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri, 2017. Hlm 102
- Melki. (2018). *Hubungan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*. Soumatara Law Review. Vol. 1 No. 1, 2018. Hlm 147.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosda karya Offset, Bandung Hal 216
- Moleong. L.J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosda Karya. Hlm 3

Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Modul Hubungan Kerja DPRD Dan Pemerintah Daerah, Semarang, 2019, hlm. 9.

Profil Kesehatan Kabupaten Wonogiri 2018

Sipayung, Nurdin. Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Serdang Bedagai. MS thesis. 2008.

Slamet, Yulius. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. UNS Press. Surakarta. Hal 140-143

Suseto, F. B., Hananto, U. D., & Herawati, R. (2013). Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD di Kabupaten Bekasi Jurnal Ilmiah. *Diponegoro Law Journal*, 2(2), 1-7.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta hal 274-278

Wiratman, Y. (2016). *KEDUDUKAN DAN WEWENANG KOMISI INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 F UNDANG-UNDANG DASAR 1945* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

Yuda, Dede. “*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Dalam Bidang Kesehatan*”. STIKES Bakti Tunas Husada. Tasikmalaya. Tahun 2014

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Kabupaten Wonogiri Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan.

Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Internet

<https://si.disperakim.jatengprov.go.id/>

<https://wonogirikab.bps.go.id/>

<https://wonogirikab.bps.go.id/publikasi>

<https://dprd.wonogirikab.go.id/index.php/fraksi>

<https://kpud-wonogirikab.go.id>